

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah rezim pemerintahan bagaimanapun kuat dan besar kekuasaannya tidak akan pernah berjaya terus-menerus tanpa ada batasnya. Suatu saat rezim tersebut kekuasaannya pasti akan melemah dan akhirnya mengalami keruntuhan. Tidak ada rezim yang mampu bertahan selamanya dan tidak ada pemimpin yang mampu menggenggam kekuasaannya secara langgeng dan abadi. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar wibawanya dan piawai memimpin rakyatnya, suatu waktu ia harus rela mundur dan jatuh dari kekuasaannya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, telah beberapa kali mengalami pergantian pemerintahan dan kepemimpinan. Sejak terbentuknya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa kali pergantian kepala negara. Dari mulai pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini.

Proses berakhirnya sebuah rezim pemerintahan tidak selalu berjalan dengan mulus. Pergantian kepemimpinan dari rezim yang lama ke rezim yang baru seringkali diwarnai dengan pergolakan politik, baik yang terjadi sebelumnya maupun sesudah peralihan itu terjadi. Gejolak politik yang mengiringi jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto merupakan peristiwa yang banyak menyita perhatian khalayak ramai, baik secara lokal maupun internasional. Hal ini dapat dipahami karena pada zaman pemerintahan kedua Presiden tersebut posisi Indonesia cukup disegani oleh dunia internasional. Bahkan banyak yang beranalisis bahwa kejatuhan dua Presiden tersebut tidak terlepas dari konspirasi dan campur tangan dunia internasional (Isak, 2002).

Situasi politik di Indonesia menjelang berakhirnya pemerintahan Soekarno diwarnai dengan adanya pertentangan-pertentangan antar berbagai kekuatan politik yang ada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan pada waktu itu. Adanya tiga kekuatan politik yang menampilkan “permainan-segi-tiga” dengan

Yaya Sumirat, 2014

Gejolak Politik Di Akhir Kekuasaan Presiden : Kasus Presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelaku utama yaitu Soekarno, PKI, dan ABRI, ditambah dengan pelaku pembantu baik berupa partai politik maupun oknum individu di sekitar pelaku utama tersebut (Anwar, 2006:328).

Dengan adanya Dekrit Presiden pada 5 Juni 1959 yang secara resmi mengembalikan Undang-Undang 1945, maka masa Demokrasi Terpimpin pun dimulai. Soekarno, sebagai presiden, memperkuat posisinya terhadap parlemen, posisi-posisi penting diberikan kepada para pendukung loyalnya, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sesuai dengan keinginan Soekarno dapat dilaksanakan tanpa gangguan. Selain Soekarno, masih ada dua kekuatan lain lagi, yaitu PKI yang mulai masuk dalam pemerintahan dan ABRI dengan konsep Dwifungsi-nya yang sejak tahun 1958 mengintensifkan keterlibatan militer dalam administrasi sipil, politik, dan ekonomi Indonesia. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan dari kedua kekuatan itu dengan menempatkan dirinya di tengah untuk mengontrol semua pihak (Beise, 2004:12-14).

Sementara itu, berpalingnya Soekarno dari negara-negara Barat dengan meninggalkan kebijaksanaan *non-blok* dan mengarahkan ke sebuah poros Jakarta-Beijing-Pyongyang-Hanoi, membuat Amerika Serikat menjadi semakin khawatir Indonesia akan menjadi satu lagi negara yang akan jatuh dalam teori domino. Banyak pihak yang menghawatirkan sistem keseimbangan yang dibangun Soekarno suatu saat akan rapuh dan tak dapat lagi dikontrol olehnya, sehingga salah satu kekuatan akan menyelesaikan situasi yang sangat tidak jelas itu dengan tindakan kekerasan. Secara teoritis, kekuatan yang mungkin melakukan tindakan tersebut antara lain PKI, Angkatan Darat, kekuatan ekstern seperti Amerika Serikat, atau bahkan Soekarno sendiri (Beise, 2004:15).

Kondisi tersebut semakin memanas setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Indonesia mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik yang cukup parah. Masyarakat umum diliputi kecemasan, unjuk rasa mahasiswa berlangsung di mana-mana, inflasi meningkat hingga mencapai 650%, dan harga-harga pun membumbung tinggi. Apalagi penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut belum terlihat ada tanda-tanda akan dilaksanakan oleh Presiden Soekarno

sesuai dengan janjinya. Krisis politik pun semakin mendalam dan akibatnya mulai terjadi erosi kepercayaan rakyat kepada Presiden Soekarno dan pemerintahannya (Poesponegoro, 2008: 405).

Kekuasaan Presiden Soekarno merosot drastis sejak dikeluarkannya Supersemar. Pada masa kabinet Ampera yang disempurnakan yang dibentuk pada tanggal 11 Oktober 1966 ini posisi dan peran Presiden sama sekali tidak mempunyai arti (Suharto, 2006:8). Puncaknya, pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan *Nawaksara* dianggap mengecewakan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Hingga pada akhirnya pada hari Kamis 23 Pebruari 1967 disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto (Poesponegoro, 2008: 425). Selanjutnya, dengan Ketetapan No. XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pengemban Tap. MPRS No. IX/MPRS/1966 menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu (Suharto, 2006:8).

Krisis politik yang terjadi menjelang kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto tidak kalah parahnya. Adanya tuntutan akan reformasi yang terus meningkat ditambah dengan semakin memburuknya masalah perekonomian dan kerusuhan masal yang terjadi di berbagai tempat telah memporak-porandakan benteng terakhir rezim yang telah berkuasa 32 tahun tersebut (Ricklefs, 2008:688). Gejolak politik dan sosial yang terjadi pada bulan Mei 1998 itu memiliki potensi besar menimbulkan terjadinya kekerasan antara kekuatan pendukung karena bagaimanapun, kekuatan Soeharto pada waktu itu masih sangat besar. Selain ABRI masih berdiri di belakangnya, selaku pemegang TAP V/MPR, ia juga diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan pembangunan dan mempertahankan kekuasaannya. (Sulastomo, 2008: 78).

Banyak cara yang masih bisa dilakukan oleh Soeharto untuk memukul, menghentikan, dan menghancurkan barisan orang-orang yang akan menggoyang

kekuasaannya. Ia masih bisa memerintahkan Prabowo misalnya, dengan menjanjikan promosi baginya, supaya mau menggunakan pasukannya untuk menghentikan momentum mahasiswa hingga pembantaian massal di Tiananmen, Beijing, pada tahun 1989 akan terulang lagi di Jakarta (Emmerson, 2001:590). Namun kenyataannya, Perang saudara yang mengerikan itu dapat dihindari dan proses pergantian kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie berjalan secara lancar dan relatif damai. Soeharto dengan sikap penuh santun seperti meyakinkan kepada semua pihak bahwa berakhirnya kepresidenan itu sebagai suatu hal yang menjadi pilihan dan keputusannya sendiri, secara bebas, tanpa dipaksa.

Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden Republik Indonesia. Pidato tersebut menandai berakhirnya sebuah kekuasaan yang telah digenggam dengan kuatnya selama beberapa periode ke belakang. Masa kepresidenan yang panjang selama kurang lebih tiga puluh dua tahun itu diakhiri dengan prosesi pengunduran diri yang diucapkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, bukan kata-kata spontan atau sambil lalu (Emmerson, 2001:521).

Pengumuman pengunduran diri Soeharto pada Kamis pagi itu cukup mengejutkan masyarakat dunia. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya mendorong Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan presiden? Setelah enam kali berturut-turut menjadi orang nomor satu di negeri Indonesia, mengapa Soeharto dengan begitu mudahnya mau melepaskan kekuasaan yang telah digenggam selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Padahal banyak pengamat berkesimpulan sebelumnya, bahwa selama Soeharto bisa dan mampu, ia tak akan rela melepaskan atau menyerahkan tampuk kekuasaannya pada siapa pun (Emmerson, 2001:527).

Mundurinya Soeharto dari jabatan presiden banyak mendapatkan tanggapan dari kepala pemerintahan maupun berbagai tokoh dunia lainnya. Dunia pers pun tidak ketinggalan, baik media lokal maupun internasional ikut menyoroti dan memberikan pandangan lewat pemberitaan-pemberitaannya. Para pengamat di

Amerika memberikan hipotesa bahwa lengsernya Soeharto disebabkan karena ketiadaan demokrasi di bawah Orde Baru yang akhirnya mengakhiri rezim itu. Pengamat lainnya lebih menyoroiti fenomena legitimasi politik sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari sudut pandang itu, tumbangnya Soeharto disebabkan karena ambruknya perekonomian dan bukan karena langkanya demokrasi (Emmerson, 2001:529).

Argumen lain mengatakan bahwa pergolakan yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan Soeharto ingin dan sukarela memilih untuk mengundurkan diri. Kemelut sepanjang 1997-1998 membahayakan dua faktor legitimasi yang terpenting bagi rezimnya, yaitu ancaman terhadap kematian pertumbuhan ekonomi dan kehancuran stabilitas politik. Meskipun Soeharto masih tetap mau menjadi presiden, katanya, hanya karena tanggung jawab yang dirasakannya terhadap bangsa dan tak ingin menyelinap pergi dari medan pertempuran dan kondisi negara yang gawat. Namun jika rakyat sudah tidak menghendaki kepemimpinannya, ia siap berhenti dan tak ingin rakyat menganggap dirinya sebagai rintangan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa (Emmerson, 2001:532).

Munculnya bermacam-macam analisis seperti yang dikutip dan dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa peristiwa jatuhnya rezim Soekarno dan Soeharto merupakan sebuah peristiwa yang fenomenal yang mampu menyita perhatian berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun internasional. Mengamati hal tersebut, saya merasa tergerak untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa tersebut dari pemberitaan dan sudut pandang pers. Pers merupakan salah satu media yang independen yang memiliki hak dan fungsi dalam memotret keadaan dan kehidupan perpolitikan yang sedang berlangsung saat itu. Sikap dan pandangan yang dikemukakan oleh media masa, bagaimanapun merupakan refleksi dari sikap, pendirian, dan keyakinan para redaktur pers yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai institusi sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Suwirta, 2000:1-2). Meskipun dalam kondisi perpolitikan dan perekonomian yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi

dan terciptanya stabilitas politik, seringkali memaksa pers untuk menyurutkan peran politiknya dan terkadang harus meninggalkan ciri-ciri formalnya sebagai pers yang idealis (Fatah, 1999:47).

Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan kajian untuk menelaah pemberitaan-pemberitaan media massa mengenai peristiwa-peristiwa politik yang terjadi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, terutama dari surat kabar *Kompas*. Alasan dasar memilih surat kabar tersebut dikarenakan *Kompas* merupakan salah satu surat kabar nasional yang dianggap memiliki kredibilitas, terbuka, independen, dan bersikap tidak memihak kepentingan politik apapun. Hal tersebut dikemukakan oleh Asvi Warman Adam (2002:141-143) bahwa meskipun dilahirkan oleh lingkungan Katholik, harian ini sejak semula telah mengambil posisi sebagai surat kabar yang terbuka dan independen karena banyak memberi sumbangan melalui penyajian berbagai topik dan keakuratan dalam menyajikan pemberitaannya.

Selain itu *Kompas* juga ikut menyaksikan dan mengawal pergolakan politik yang terjadi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

Kompas merupakan media massa yang tetap utuh dan konsisten dengan visi dan misinya dari sejak awal berdirinya hingga sekarang. Ketika surat kabar lain terpaksa harus berganti nama atau menukar kebijakan pemberitaan karena terjangkit badai Orde Baru, *Kompas* satu-satunya surat kabar nasional yang selamat (Adam, 2002:138). Visi dan misi *Kompas* seperti yang diungkapkan oleh Asvi Warman Adam (2002:143) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan falsafah organisasi yang telah ditetapkan sendiri oleh perusahaan, dapat dirumuskan bahwa visi *Kompas* adalah sebagai agen sejarah, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, patriotis, dan profesional. Misi *Kompas* adalah mengabarkan dan menyebarkan informasi (ini termasuk sumber sejarah). Melalui bisnis dalam bidang pers yang dikelola dengan manajemen yang sehat dan etika usaha yang bersih diciptakan pemberitaan yang akurat dan proporsional dalam rangka mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Disiplin dan kejujuran menjadi kata kunci bagi para pengasuh media ini untuk menjadikan

usaha mereka mampu menjadi nomor satu. Melalui sinergi sesama karyawan dan antara karyawan dan perusahaan, diciptakan layanan dan prestasi maksimal untuk menyampaikan hati nurani rakyat.

Sejak diterbitkan untuk pertama kalinya pada tanggal 28 juni 1965, perkembangan surat kabar *Kompas* grafiknya lebih terlihat meningkat naik dari waktu ke waktu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, tanpa disertai gejolak besar internal seperti yang pernah dialami surat kabar nasional lainnya. Saat ini, *Kompas* telah menjadi surat kabar nasional yang sangat besar dan berpengaruh di negara Indonesia (Adam, 2002:138-139).

Mengingat akan hal itu, cukup menarik kiranya untuk menggali dan meneliti peristiwa sejarah dari sudut pandang surat kabar tersebut. Bagaimana sebenarnya tanggapan, sikap, serta pendirian surat kabar *Kompas* yang ditunjukkan lewat pemberitaan-pemberitaannya dalam bentuk tajuk rencana, catatan pojok, dan karikturnya. Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“GEJOLAK POLITIK DI AKHIR KEKUASAAN PRESIDEN: Kasus Presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto (1996-1998)) dalam Pandangan Surat Kabar *Kompas*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto.”

Agar pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno?
2. Bagaimana proses berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto?
3. Bagaimana sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai gejolak politik yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno?

4. Bagaimana sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai gejolak politik yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto?
5. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai gejolak politik yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai secara khusus dalam penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis serta mengemukakan bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi di akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto.”

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan dampaknya bagi perkembangan politik di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan proses berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan dampaknya bagi perkembangan politik di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengungkapkan sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi di akhir kekuasaan Presiden Soekarno.
4. Untuk menganalisis dan mengungkapkan sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi di akhir kekuasaan Presiden Soeharto.
5. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi di akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto.

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pergolakan politik yang terjadi pada masa berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis bagi khalayak umum dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai latar belakang politik dan kronologi peristiwa berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto.
2. Memberikan penjelasan bagaimana pandangan media massa mengenai pergolakan politik yang terjadi di akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto terutama sikap dan pandangan dari surat kabar *Kompas*.
3. Memberikan kontribusi materi sejarah mengenai situasi dan kondisi dunia pers pada masa berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada pedoman karya ilmiah UPI sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian mengenai pergolakan politik pada masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang sumber-sumber yang didapatkan dan digunakan oleh penulis yang di dalamnya terdapat berbagi fakta, konsep, generalisasi, serta pendapat para ahli sejarah mengenai pergolakan politik pada masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Yaya Sumirat, 2014

Gejolak Politik Di Akhir Kekuasaan Presiden : Kasus Presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab ini mengungkapkan rangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai pergolakan politik pada masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Rangkaian penelitian tersebut akan dijabarkan secara kronologi dan terperinci dari mulai persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan penelitian.

BAB IV SIKAP DAN PANDANGAN SURAT KABAR *KOMPAS* MENGENAI PERGOLAKAN POLITIK YANG TERJADI MENJELANG BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEKARNO DAN SOEHARTO

Bab ini berisi pendeskripsian hasil penelitian mengenai pergolakan politik pada masa berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, serta bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* terhadap peristiwa tersebut berdasarkan pemberitaan-pemberitaannya, yang akan dituangkan secara sistematis dan kronologis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam rumusan masalah mengenai mengenai pandangan surat kabar *Kompas* mengenai pergolakan politik yang terjadi pada masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

